

**KERJA SAMA ANTARDAERAH DALAM SEKTOR PERSAMPAHAN
BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(Studi di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta)**

Sekar Arum A. Prameswari, M.R. Khairul Muluk, Ike Wanusmawatie

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: adzanisiah@gmail.com

Abstract: *Inter-regional Cooperation in Waste Sector Based Sustainable Development.* Urban development grows rapidly along with population growth triggers waste problem. This waste problem can be managed if there is inter-regional cooperation. The form and the program of inter-regional cooperation is reflected in handling waste sector in Sekretariat Bersama Kartamantul, Yogyakarta. The inter-regional cooperation is formed to build regions based on administrative development, especially sustainable development. The research aims to find out inter-regional cooperation in waste sector based on sustainable development in Sekretariat Bersama Kartamantul, Yogyakarta. This research uses qualitative research type. In building inter-regional cooperation, there are form and programs in waste sector that are intertwined. Inter-regional cooperation aims to be able to fulfil mutual needs of other regions in developing the regions. Inter-regional cooperation in waste sector has brought beneficial result and the result of developing the regions which is based on the principles of sustainable development. Inter-regional relationship requires inter-regional management to achieve the objective of inter-regional cooperation. The types of inter-regional cooperation which are built in Sekretariat Bersama Kartamantul, Yogyakarta has become a role model of inter-regional cooperation by other regions.

Keywords: *inter-regional cooperation, intergovernmental management*

Abstrak: Kerja Sama Antardaerah Dalam Sektor Persampahan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Perkembangan perkotaan semakin berkembang pesat menimbulkan masalah persampahan. Permasalahan persampahan diasumsikan dapat teratasi apabila dilakukan kerja sama antardaerah. Bentuk dan program kerja sama antardaerah tersebut tercermin dalam kerjasama antardaerah dalam sektor persampahan di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta. Kerja sama antardaerah ini dibentuk untuk membangun daerah berdasarkan administrasi pembangunan khususnya pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kerja sama antardaerah dalam sektor persampahan berbasis pembangunan berkelanjutan di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam membangun kerjasama antardaerah ini terdapat bentuk dan program kerja sama antardaerah dalam sektor persampahan. Kerja sama antardaerah bertujuan saling memenuhi kebutuhan daerah lainnya dalam pembangunan daerah. Kerja sama antardaerah dalam sektor persampahan telah membawa hasil kerja sama saling menguntungkan dan hasil pembangunan daerah yang didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Hubungan antarpemerintahan membutuhkan manajemen antarpemerintahan untuk mencapai tujuan kerja sama antardaerah. Jenis kerjasama antardaerah yang dikembangkan di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta ini telah menjadi panutan bentuk kerja sama antardaerah oleh daerah lain.

Kata kunci: *kerja sama antardaerah, manajemen antarpemerintahan.*

Pendahuluan

Kerja sama di era reformasi saat ini sudah tidak dapat dielakkan lagi. Melihat banyak permasalahan publik yang tidak dapat diselesaikan secara individu oleh pemerintah. Kerja sama merupakan cara untuk mengatasi permasalahan dengan tidak hanya melihat dari satu faktor dan sektor

pemerintahan tertentu tetapi melihat faktor dan sektor lain yang mana dapat disinergikan dalam bentuk kerja sama dalam mengatasi masalah. Kerja sama antardaerah merupakan hubungan antarpemerintahan yang dianggap nantinya dapat lebih mendalam dalam memecahkan masalah antarwilayahnya dan dapat memenuhi kebu-

tuhan secara lokal dan sesuai dengan tingkat kemampuan setiap daerah. Kerjasama antarpemerintahan juga dibutuhkan dalam sebuah peningkatan pelayanan antardaerah terutama dalam pelayanan yang melibatkan daerah yang berdekatan. Kerjasama yang pertama dijalin adalah kerjasama antardaerah atau antarpemerintahan. Ini dimaksudkan antardaerah saling berkoordinasi dan saling mengetahui kebutuhan dan permasalahan sampah di daerahnya agar dapat dibantu oleh daerah lain yang berada dalam kerja sama.

Kerjasama antardaerah secara formal berada dalam payung hukum yang jelas melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa beberapa daerah dapat mengadakan kerja sama antardaerah yang diatur dengan keputusan bersama, (2) daerah dapat membentuk badan kerja sama antardaerah, (3) daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan bersama, (4) keputusan bersama dan/atau badan kerja-sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD. Kebijakan kerja sama tersebut diatas diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang tatacara pelaksanaan kerjasama daerah. Khusus pada pasal 4 pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan masyarakat oleh pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, perparkiran dan persampahan.

Salah satu pelayanan publik/umum yang menjadi masalah besar adalah persampahan yang dimana proses penanganan dan pengelolaannya kurang efektif dan efisien terlebih lagi banyak permasalahan mengenai sampah yang belum dapat dipecahkan secara tuntas dalam prakteknya di kebanyakan tempat saat ini. Seperti halnya di DI Yogyakarta masalah sampah merupakan hal yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan. Masalah sampah yang menumpuk di ujung kampung DI Yogyakarta

yang tidak dapat diatasi dengan baik oleh masyarakat dan kurangnya perhatian pemerintah. Mengingat juga lahan TPA Piyungan yang dapat menampung sampah hanya sampai pada tahun 2012 saja membuat pemerintah harus melakukan langkah-langkah baru untuk masalah sampah tersebut. Selain itu banyak masalah sampah lainnya yang harus ditangani di daerah DI Yogyakarta, penanganan tempat pembuangan sampah (TPS) yang bersifat ilegal tanpa pengawasan dari pemerintah dapat menjadi masalah yang rumit dalam pembangunan sebuah daerah. Permasalahan sampah yang sulit diatasi jika tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal yang ada berada pada daerah perbatasan antardaerah atau di daerah yang kurang dapat dijangkau dan dikontrol secara rutin oleh pemerintah.

Melihat dari hal diatas maka teretuslah ide kerja sama antardaerah yang menangani pengelolaan sampah, dan tidak hanya sampah tetapi sarana prasarana lainnya di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Sekretariat Bersama Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul) merupakan bentuk kerja sama antardaerah yang mengurus tentang sarana prasarana di wilayah DI Yogyakarta. Melalui SK Bersama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman dan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 583b/B/SKB/Bt/1996, 310/Kep/KDH/1996/1169 Tahun 1996 tentang Kerjasama Pembangunan Antardaerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Prasarana Perkotaan. Untuk memantapkan kerja sama antardaerah yang dijalin dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta No.152a/02/SKB.KDH/A/2004, Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta No.04/Pem/RT/2001, 38/Kep.KHP/2001, Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelola Prasarana Dan Sarana Perkotaan Antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman Dan Kota Yogyakarta.

Dengan adanya Sekretariat Bersama Kartamantul ini khususnya pada sektor persampahan, maka pengelolaan sampah

dapat diatasi dengan kerja sama antardaerah yang dijembatani oleh Sekretariat Bersama. Program-program yang dilakukan oleh Sekretariat Bersama Kartamantul ini semuanya dilaksanakan untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di karenakan saat ini sangat dibutuhkan program yang dapat menjaga lingkungan agar dapat diolah dengan baik secara berkelanjutan tanpa merusak tetapi mengambil manfaat dari lingkungan tersebut serta memperbarui untuk kehidupan generasi selanjutnya. Berawal dari pentingnya kerja sama antarpemerintah daerah dalam sebuah pembangunan suatu daerah/wilayah, maka dalam penelitian ini didapatkan rumusan masalah “Bagaimana kerjasama antardaerah dalam sektor persampahan berbasis pembangunan berkelanjutan di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta?”

Kajian Pustaka

1. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan sebagai *agent of change* yang bersifat dinamis dan inovatif dalam upaya mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik melalui kebijaksanaan dan program-program pembangunan pada negara sedang berkembang. Administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat dalam pengalokasian sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan (Kartasmita, 1997, h.35). Pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu paradigma dari pembangunan memiliki fokus utama yaitu mewujudkan keseimbangan pembangunan sosial dan lingkungan agar mendukung pertumbuhan ekonomi (Suryono, 2010, h.82). Batasan pembangunan berkelanjutan menurut WCED (*World Commission on Environment and Development*) (Hadi, 2001, h.2) bahwa pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang sederhana namun kompleks yang tidak hanya memperhatikan nilai keadilan antar-generasi, namun juga terdapat nilai-nilai yang menyebabkan penekanan yang ber-

beda terhadap apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dikembangkan yaitu seperti *freedom, equality, solidarity, tolerance, respect for nature, and shared responsibility* (Roehrl, 2013, h.9).

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga indikator tercapainya pembangunan berkelanjutan. Syarat-syarat tersebut secara umum terbagi dalam tiga indikator utama (Gondokusumo, 2005): Pro-Ekonomi Kesejahteraan, maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi ditunjukkan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan. Pro-Lingkungan Berkelanjutan, maksudnya etika lingkungan non-antroposentris yang menjadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konsevasi sumberdaya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non-material. Pro-Keadilan Sosial, maksudnya adalah keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya. Pembangunan berkelanjutan mendukung dalam pembangunan daerah dimana pembangunan daerah harus berbasis pada pembangunan berkelanjutan, Menurut Nugroho (2004, h. 188), pembangunan daerah melalui mekanisme pengambilan keputusan otonomi diyakini mampu merespon permasalahan aktual yang akan sering muncul dalam keadaan masih tingginya intensitas alokasi sumber daya alam dalam pembangunan.

2. Hubungan Antarpemerintahan

Hubungan antarpemerintahan merupakan sebuah studi dari negara-negara maju yang berawal dari tahun 1980-an di Inggris dan Amerika Serikat. Hubungan antarpemerintahan menekankan pada hubungan pusat dan daerah, bagaimana hubungan tersebut untuk perkembangan dan penyelesaian masalah suatu negara atau suatu daerah. Menurut Rhodes (1991) dalam Stoker (1995, h.101) “*the study of Intergovernmental relations can justifiably claim to be in the theoretical vanguard of discipline drawing as it does on insights from all but*

one of the various theoretical currents in public administration”.

Ada tiga pendekatan menurut Smith (1985) dalam melihat bagaimana hubungan antarpemerintahan atau berjalan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan keadaan negara tersebut atau keadaan daerah tersebut.

- a. Hukum dan Administrasi
- b. Politik Komunitas
- c. Politik antar Organisasi

Kerja sama antardaerah merupakan kebijakan yang penting untuk daerah yang akan melakukan kerjasama. Menurut Remses dan Bowo (2007) dalam Domai (2010, h.30) mengatakan kerja sama antarpemerintahan daerah otonom pada semua jenjang dan lembaga lainnya adalah kebijakan yang penting karena alasan sebagai berikut: Pelaksanaan urusan-urusan yang bersifat lintas daerah otonom yang terkait dengan pelayanan masyarakat dapat efektif dan efisien jika dilaksanakan bersama secara sinergi antardaerah otonom. Aspek-aspek pelayanan masyarakat tertentu menjadi optimal jika dilaksanakan secara terpadu oleh daerah yang berbatasan.

Hubungan antarpemerintah berjalan efektif dan efisien ketika didukung oleh manajemen yang menjalankan hubungan antarpemerintahan tersebut. Manajemen antarpemerintahan diperlukan agar tujuan dari hubungan antarpemerintahan menjadi terlaksana dan terwujud dengan baik sesuai rencana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Situs penelitian ini yaitu Sekertariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta dan TPA Piyungan, Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan melalui situs penelitian di atas, peneliti bisa mendapatkan sumber data primer maupun sekunder. Kemudian data yang diperoleh di lapangan dianalisis menggunakan metode analisis *Coding* dari Bogdan Biklen (Emzir, 2010, h.112) yaitu merupakan pengembangan suatu sistem pengkodean untuk menganalisis dan menyusun data setelah tahap pengumpulan data, meskipun cara tersebut lebih sulit, latarnya lebih kompleks, namun peng-

kodean ini dianggap lebih spesifik. Kode-kode tersebut, antara lain: kode latar/konteks, kode situasi, cara subjek berpikir tentang objek, kode proses, kode aktivitas, kode peristiwa, kode strategi, kode hubungan dan struktur sosial, kode naratif, kode metode.

Pembahasan

Berdasarkan desentralisasi sebagai sistem pemerintahan yang saat ini berkembang di Indonesia dimana pemerintahan di daerah tidak lagi harus sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat melainkan diberi kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Banyak berbagai macam cara desentralisasi diwujudkan untuk membangun daerahnya masing-masing. Pendekatan hubungan antarpemerintahan yang terbagi dalam tiga pendekatan yaitu antara lain hukum dan administrasi; politik komunitas; politik antarorganisasi, bentuk kerja sama antardaerah yang meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman cenderung mengarah pada pendekatan politik antarorganisasi atau politik jaringan. Bentuk kerja sama antardaerah ini meliputi kerja sama yang dilakukan antarpemerintah daerah untuk saling melengkapi kebutuhan pembangunan masing-masing daerahnya dengan tidak bergantung pada salah satu pemerintah daerah saja.

Kerja sama ini juga dilakukan dengan pihak di luar pemerintah ketiga daerah yaitu pihak swasta, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), media komunikasi (koran, televisi, radio, dll), dan masyarakat. Kerjasama antardaerah dalam hal ini diperuntukkan agar daerah dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sesuai dengan kemampuan dari daerah tersebut sehingga dapat mengajak daerah lain untuk saling membantu kekurangan daerah lain dalam memenuhi kebutuhannya menurut (Smith, 1985, h.94) yang merupakan inti dari pendekatan politik antarorganisasi atau politik jaringan. Kerja sama antardaerah merupakan suatu inovasi dimana kerja sama ini merupakan suatu program atau cara dalam sebuah administrasi pembangunan khususnya dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah ini tidak hanya fokus terhadap bidang ekonomi saja tetapi dalam bidang

lingkungan dan sosial maupun budaya juga diperhatikan. Hubungan antarpemerintahan harus didukung dengan manajemen antarpemerintahan agar tujuan dari kerjasama antardaerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah-daerah yang terjalin kerja sama.

Administrasi pembangunan berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah perkembangan wilayah perkotaan saat ini dirasa sangat pesat dan dapat menembus batas wilayah administratif. Perkembangan perkotaan yang dimaksud adalah pemekaran wilayah perkotaan yang melewati batas administratif yang telah ditentukan. Permasalahan perkembangan perkotaan seperti yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta ini telah menggeser batas wilayah administrasi perkotaan menjadi meluas dimana perbatasan pembangunan daerah kabupaten/kota sudah melewati batasnya dan menjadi tidak terkendali. Dalam pembangunan daerah maka pelayanan merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Berawal dari perkembangan perkotaan ini maka kerja sama antardaerah sangat dibutuhkan agar pelayanan dan pembangunan sarana prasarana terkoordinasi dengan jelas dan tidak saling melimpahkan tanggung jawab. Kerja sama antar daerah dalam kerjasama tiga daerah yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul ini diperuntukan agar pembangunan daerah berjalan dengan baik. Kerja sama antardaerah dilakukan karena adanya tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dan permasalahan yang sama antardaerah tersebut.

Kerja sama yang dibentuk ini memiliki sebuah badan yang terfokus dalam tugasnya sebagai fasilitator, koordinator, mediator, monitoring dan evaluasi yaitu Sekretariat Bersama Kartamantul, Kartamantul adalah singkatan dari Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Sekretariat Bersama Kartamantul ini memiliki kewenangan untuk mengurus segala aktivitas kegiatan dan program dalam kerjasama yang telah disetujui oleh ketiga daerah. Sekretariat Bersama Kartamantul selain sebagai fasilitator, koordinator, mediator, monitoring dan evaluasi juga sebagai tim pengurus semua program kegiatan yang ada.

Semua urutan tanggung jawab tersebut tersusun dalam sebuah Keputusan Gubernur DIY No.175/KPTS/1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Prasarana Perkotaan, SKB Bupati Bantul, Sleman dan Walikota Yogyakarta Tahun 1995 tentang Kerjasama Pembangunan Antardaerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Prasarana Perkotaan. Ada pula legalitas untuk pembentukan Sekretariat Bersama dalam Keputusan Gubernur DIY No.200/KPTS/1997 tentang Pembentukan Badan Sekretariat Kerjasama Pembangunan Yogyakarta, Sleman dan Bantul, dan diubah menjadi Keputusan Bersama Bupati Bantul, Sleman dan Walikota Yogyakarta tahun 2001 dan 2003 tentang Pembentukan dan Perubahan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antara Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Sekretariat Bersama Kartamantul memiliki tugas dan fungsi dimana sebagai media kerja sama antardaerah. Peranan Sekretariat Bersama Kartamantul dalam kerja sama antardaerah ini adalah sebagai badan/lembaga yang fokus kepada kerjasama ini berjalan tanpa ada yang diuntungkan dan dirugikan. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Bersama Kartamantul adalah koordinasi, fasilitasi, mediasi, monitoring dan evaluasi. Sekretariat Bersama Kartamantul sebagai wadah dari pemerintah maupun masyarakat untuk menuangkan keluhan, aspirasi, dan permasalahan persampahan yang ada di daerah perbatasan ketiga pemerintahan daerah tersebut khususnya.

Pengambilan keputusan yang berada di Sekretariat Bersama Kartamantul yaitu proses pengambilan keputusan tim teknis yang terdiri dari tiga kabupaten/kota di Sekretariat Bersama Kartamantul yang beranggotakan perwakilan dari dinas terkait khususnya dalam sektor persampahan, seperti bagian Keuangan, Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Hukum, serta Kecamatan dan Kelurahan Piyungan untuk program yang berada di TPA Piyungan. Program dan rencana kegiatan yang disusun oleh tim teknis tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) masing-masing daerah. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang

ada di masing-masing daerah, tim teknis melihat apakah ada rencana dan anggaran yang sama di tiap daerah untuk pembangunan di sektor persampahan atau di sektor lain yang dapat dilaksanakan untuk program dan rencana kegiatan di tahun yang baru. Setelah program dan rencana kegiatan sudah terbentuk maka akan dirapatkan bersama dengan mengundang tiga pemangku daerah dan dinas atau lembaga terkait sesuai dengan apa yang akan di rapatkan pada hari yang sama.

Pelaksanaan kerja sama antardaerah ini dalam hal pembiayaan atau anggaran yang digunakan untuk biaya operasional Sekretariat Bersama Kartamantul dan sektor persampahan atau TPA Piyungan seperti dijelaskan di poin sebelumnya adalah perencanaan, anggaran dan pelayanan dilakukan bersama. Pembiayaan di sektor persampahan dilakukan *sharing* pembiayaan antarpemerintah daerah. Dilihat dari jumlah volume sampah yang masuk ke dalam TPA Piyungan. Pembiayaan ini terkoordinir oleh Sekretariat Bersama Kartamantul yang berasal dari tiga pemerintah daerah. Selain itu kerja sama tersebut termasuk dalam pengaturan kerja sama *equipment sharing* dimana melalui pembiayaan yang dilakukan oleh ketiga daerah ini untuk memenuhi fasilitas di dalam TPA Piyungan dan sektor persampahan di luar TPA Piyungan. Pembiayaan dengan cara *sharing* ini dapat memperingan beban masing-masing daerah.

Pembiayaan khususnya di sektor persampahan juga menggunakan biaya *sharing* dari tiga daerah. Pembiayaan tersebut dihitung dari volume sampah yang masuk kedalam TPA Piyungan, dimana setiap truk pengangkut sampah dari daerah masing-masing ditimbang di jembatan timbang untuk mengetahui volume sampah yang dibawa. Hasil dari volume sampah tersebut akan direkapitulasi dalam bentuk laporan tahunan yang dapat menjadi acuan untuk masing-masing daerah melihat berapa yang harus mereka *sharing*-kan biaya untuk operasional sektor persampahan terutama TPA Piyungan. Tidak hanya truk sampah berasal dari pemerintahan saja yang masuk kedalam TPA Piyungan tetapi truk sampah swasta yang bukan milik pemerintah juga membuang di TPA Piyungan. Dengan

demikian maka truk sampah tersebut harus terlebih dahulu mendaftarkan nomor polisi truknya ke pada masing-masing daerah truk tersebut berasal. Berdasarkan volume sampah yang masuk maka truk sampah swasta harus membayar retribusi sesuai dengan volume sampahnya kepada daerah masing-masing atau kepada dinas di daerah masing-masing yang mengurus tentang pembayaran tersebut. Selain terdapat rekapitulasi volume sampah tiap tahun, TPA Piyungan juga merekapitulasi secara berkala dalam jangka waktu tiga bulan yang dilaporkan kepada masing-masing daerah.

Dalam mencapai suatu kerja sama yang baik antara beberapa daerah untuk melaporkan perkembangan akan suatu program yang dikerjasamakan, monitoring menjadi suatu fokus yang penting dalam melihat bagaimana target yang telah tercapai. Monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan oleh ketiga pemerintah daerah saja tetapi juga melibatkan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media. Pengawasan dalam bentuk monitoring dapat berupa rapat rutin, laporan rutin hingga pengawasan setiap hari di lapangan di TPA Piyungan mau pun di daerah bekas pem-buang sampah *illegal* yang telah dievakuasi. Pengawasan dalam bentuk evaluasi dari ketiga daerah juga dilakukan dengan cara Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) secara rutin. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari TPA Piyungan direkapitulasi dalam laporan triwulan dan dibawa ke Sekretariat Bersama Kartamantul dan dilaporkan kepada setiap daerah. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) secara triwulan ini berisi tentang kegiatan yang dilakukan selama tiga bulan tersebut, penggunaan anggaran untuk apa saja anggaran tersebut digunakan dalam waktu tiga bulan, jumlah volume sampah yang masuk dari masing-masing daerah, laporan pengelolaan lingkungan seperti air limbah sampah (Lacid), udara, kandungan air bersih yang ada di sumur pantau, dan terakhir permasalahan yang ada di sekitar TPA Piyungan seperti keluhan masyarakat dan kecelakaan dalam bekerja. Laporan ini diberikan kepada masing-masing daerah dan nantinya dirapatkan bersama untuk

membahas permasalahan yang ada dan yang harus ditangani secara cepat.

Sedangkan program kerja sama yang dijalankan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dalam sektor persampahan seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), pemberian bantuan dana kepada masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pemulung, pemberian layanan kesehatan gratis untuk staff, masyarakat dan pemulung di TPA Piyungan, dan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program kerjasama antardaerah ini dilakukan untuk memenuhi pembangunan berkelanjutan.

Peran Sultan Hamengkubono X sebagai Gubernur DI Yogyakarta disini juga menjadi pedoman bagaimana keputusan tersebut akan dijalankan atau tidak dijalankan. Ketika tiga daerah tidak memiliki titik temu maka Sultan akan menurunkan perintah atau surat perintah kepada Sekretariat Bersama Kartamantul agar permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Dapat diartikan bahwa jika terdapat satu daerah yang menolak keputusan yang telah disetujui oleh daerah lain maka Sultan sebagai pimpinan tertinggi di struktur pemerintahan akan menolak dan membatalkan keputusan tersebut untuk dikerjakan. Penanganan masalah tersebut akan dipantau langsung oleh Sultan dan Sekretariat Bersama Kartamantul harus benar-benar dapat menjembatani tiga daerah dan menemukan permasalahan yang memberatkan satu daerah untuk menyetujui keputusan dan akan dicarikan solusi yang tidak merugikan dan memberatkan salah satu tiga daerah tersebut

Penutup

Kesimpulan

Kerja sama antardaerah dalam sektor persampahan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan perkembangan pembangunan setiap daerah tanpa membebankan

segala sesuatunya kepada satu pihak saja. Program kerjasama antardaerah tidak hanya memberi perhatian lebih pada pengelolaan sampah dalam meningkatkan kualitas lingkungan, namun juga dapat memenuhi kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan indikator pembangunan berkelanjutan. Kerja sama antardaerah menggunakan pendekatan politik antarorganisasi atau politik jaringan ini bertujuan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan perkembangan pembangunan setiap daerah tanpa membebankan segala sesuatunya kepada satu pihak saja. Hubungan antarpemerintahan tersebut didukung dengan manajemen antarpemerintahan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan kerja sama antar daerah.

Saran

Bentuk kerja sama antardaerah dalam sektor persampahan berbasis pembangunan berkelanjutan di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta diharapkan terus meningkatkan kinerja antardaerah dengan cara dilakukan peningkatan pertemuan rutin seperti rapat koordinasi, mediasi, dan fasilitasi antar tiga daerah dalam bidang tanggung jawab, lebih terbuka dan rutin memberikan laporan keuangan dalam bidang pengelolaan keuangan, membagi secara adil dengan melihat kapasitas kinerja staf yang ada sesuai dengan tersedianya sumber daya manusia sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dalam bidang pembagian staf dan peningkatan rapat evaluasi setiap program kegiatan yang telah berjalan dan memberikan laporan pertanggung jawaban rutin agar pengawasan tetap berjalan baik dan jika terjadi permasalahan dapat segera teratasi. Program kerja sama antardaerah dalam sektor persampahan berbasis pembangunan berkelanjutan di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengembangkan sosialisasi dalam pengendalian program kerja sama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Domai, Tjahjanulin (2010) **Kebijakan Kerjasama Antardaerah: Perspektif Sound Governance**. Surabaya, Jengala Pustaka Utama.
- Emzir (2010) **Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data**. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Gondokusumo, MD. (2005) **Keberlanjutan Kawasan Kota: Perspektif Kemiskinan Lingkungan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota di Indonesia dalam Abad 21**. (Internet) Available from: < www.onlinebulletine.com> (Accessed 11 September 2012).
- Hadi, Sudharto P. (2001) **Dimensi Lingkungan: Perencanaan Pembangunan**. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Kartasasmita, Ginandjar (1997) **Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia**. Jakarta, LP3ES anggota IKAPI.
- Roehrl, Richard Alexander (2013) **Sustainable Development Scenarios For Rio+20: A Component Of The SD21 Project**. New York, United Nation of Economic And Social Affairs, Division for Sustainable Development.
- Smith, B. C. (1985) **Decentralisation: The Territorial Dimension of the State**. London: Allen & Unwin
- Stoker, Gerry (1995) **Articles: Public Administration-an international quarterly- Intergovernmental Relation**. Blackwell Publishers.
- Sulistiyani, Ambar (2004) **Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan**. Yogyakarta, Gava Media.
- Suryono, Agus (2010) **Pengantar Teori Pembangunan**. Malang, Universitas Negeri Malang.
- Sutanto, Rachman. (2002) **Penerapan Pertanian Organik: Pemasarakatan & Pengembangannya**. Yogyakarta, Kanisius.